



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 22
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat I RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 19 September 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Laporan Panja RUU tentang IKN ke Raker Tk I; 3. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, DPD RI, dan Pemerintah; 4. Pengambilan Keputusan; dan 5. Penandatanganan draf RUU tentang IKN.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 (dua puluh tiga) dari 48 (empat puluh delapan) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS RI; C. Menteri Dalam Negeri RI; D. Menteri Keuangan RI; E. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI; F. Menteri Hukum dan HAM RI; G. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; H. Pimpinan DPD RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pimpinan DPD RI, dengan agenda pengantar ketua rapat, laporan Panja RUU tentang IKN ke Raker Tk I, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan *draft* RUU tentang IKN, pada hari Selasa, 19 September 2023, dibuka pukul 10.49 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pimpinan DPD RI, dengan agenda pengantar ketua rapat, laporan Panja RUU tentang IKN ke Raker Tk I, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan *draft* RUU tentang IKN, sebagai berikut:

1. Laporan Panja RUU tentang ASN, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: **R-32/Pres/06/2023 tanggal 19 Juni 2023**, hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) usul Pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam membahas RUU tersebut.
- b. Berdasarkan Keputusan **Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI tanggal 5 Juli 2023**, dengan surat dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/476/PW.11.01/07/2023 tanggal 5 Juli 2023, perihal; Penugasan untuk membahas RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagai usul inisiatif Pemerintah **Menyetujui Pembahasannya diserahkan kepada Komisi II DPR RI.**

- c. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Provinsi Komisi II DPR RI pada Senin, 21 Agustus 2023, telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:
- i. **Pada Tanggal 21 Agustus 2023** Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dengan Pimpinan Komite I DPD RI dan dengan wakil-wakil Pemerintah yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Keuangan mewakili dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dengan agenda yaitu Penjelasan/Keterangan dari Pemerintah atas RUU Tentang Perubahan (revisi) Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN), Pengantar/Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI dan DPD RI RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta **Penyerahan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta Pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN).**
 - ii. **Tanggal 22 s.d 23 Agustus 2023 Panja** melaksanakan **Kunjungan Kerja ke Ibu Kota Negara, Nusantara Provinsi Kalimantan Timur** dalam rangka **Peninjauan Kemajuan Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Negara** Nusantara yakni Pembangunan IKN Tahap I - Prioritas Pengembangan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kunjungan Panja Komisi II DPR RI antara lain ke Titik Nol, Menara Pandang Sumbu Kebangsaan Barat, Lapangan Upacara 17 Agustus 2024, Istana Presiden, Kantor Bersama 4 (empat) Koordinator Kementrian dan Perumahan Tapak Jabatan Menteri serta Dialog dengan unsur tokoh Masyarakat dan tokoh Adat Provinsi Kalimantan Timur.
 - iii. **Tanggal 11 September 2023 Rapat Intern Panja** RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) dalam rangka membicarakan mekanisme Pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN). Rapat Intern Panja dengan membahas DIM RUU IKN menggunakan **Metodologi 9 (Sembilan) Isu Pokok Perubahan dalam RUU IKN** yang disampaikan Oleh Pemerintah.
 - iv. Selanjutnya **pada tanggal 11 September 2023** dilakukan Rapat Panja bersama Pemerintah terkait pembahasan DIM berdasarkan 9 (Sembilan) Isu Pokok Perubahan dalam RUU IKN. Setelah melalui penjelasan dan perdebatan panjang maka Rapat Panja

RUU Perubahan IKN menyepakati 5 (lima) Isu Pokok Perubahan DIM dalam RUU IKN, yakni sebagai berikut:

1. Cluster No. 1 terkait Kewenangan Khusus
2. Cluster No. 4 terkait Pengisian jabatan OIKN
3. Cluster No. 5 terkait Penyelenggaraan Perumahan
4. Cluster No. 6 terkait Batas Wilayah
5. Cluster No. 8 terkait Mitra di DPR RI

v. **Pada tanggal 18 September 2023** Panja Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Akademisi dan Pakar, **dalam rangka mendapatkan masukan atas** RUU tentang IKN, adapun akademisi dan pakar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prof. Imam Kuswahyono (Universitas Brawijaya);
2. Dr. Gabriel Lele (Universitas Gadjah Mada);
3. Dr. Yuli Indrawati, SH, LLM (Universitas Indonesia); dan
4. Muhammad Adriansyah (Pemberdayaan petani dan masyarakat).

vi. **Selanjutnya pada tanggal 18 September 2023** dilakukan Rapat Panja untuk menyepakati terkait:

1. Cluster No. 2 terkait Pertanahan,
2. Cluster No. 3 terkait Pengelolaan Keuangan,
3. Cluster No. 7 terkait Tata Ruang dan Cluster
4. Cluster No.9 terkait Jaminan Keberlanjutan.

vii. Malam harinya **tanggal 18 September 2023** dilakukan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dalam rangka merumuskan dan mensinkronkan serta menyempurnakan beberapa DIM.

viii. **Pada pagi hari tanggal 19 September 2023** dilakukan Rapat Panja dengan agenda **laporan hasil pembahasan di tingkat Timus dan Timsin**, dan selanjutnya disepakati oleh Panja menjadi keputusan bersama untuk diselaraskan dan disinkronkan dalam draft akhir RUU untuk dilaporkan kepada Raker Pembicaraan Tingkat I pada pagi hari ini.

2. Penyampaian pendapat mini fraksi dan Pemerintah, sebagai berikut:

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **menyetujui** terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) untuk disahkan pada tingkat selanjutnya.
- b. Fraksi Partai Demokrat **menyetujui** terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) **dengan catatan**.

- c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera **menolak** terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN).
- d. DPD RI **menyetujui** terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN).
- e. Pemerintah **menyetujui** terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN).

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pimpinan DPD RI, dengan agenda pengantar ketua rapat, laporan Panja RUU tentang IKN ke Raker Tk I, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan *draft* RUU tentang IKN, sebagai berikut:

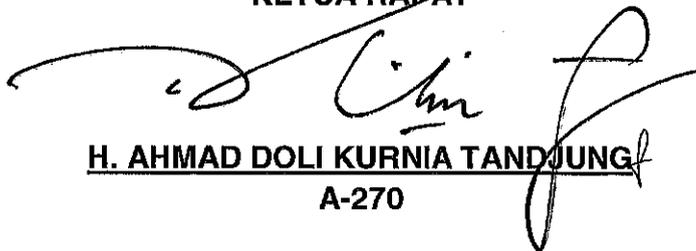
Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah menyetujui dan menandatangani *draft* Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN).

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.16 WIB.

Jakarta, 19 September 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270